

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singkawang

**Laporan Keuangan (Audited) TA 2021
Untuk Periode yang Berakhir 31 DESEMBER 2021**

**Jalan Alianyang No 02
Singkawang
79123**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singkawang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan (*Audited*) TA 2021 KPKNL Singkawang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan (*Audited*) TA 2021 KPKNL Singkawang ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPKNL Singkawang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Singkawang, 13 Mei 2022
Kepala KPKNL Singkawang



Odyses Medwan Sinurat
NIP 19700314 199703 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	I
Daftar isi	II
Pernyataan Tanggung Jawab	III
Ringkasan Laporan Keuangan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	7
A. Penjelasan Umum.....	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	28
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	32
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	33

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SINGKAWANG**

JALAN ALLIANYANG NO 02, SINGKAWANG

TELEPON : (0562) 634803, FAKSIMILE : (0562) 632342, SUREL : KPKNLSINGKAWANG@KEMENKEU.GO.ID

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan (*Audited*) Tahun Anggaran 2021 KPKNL Singkawang tingkat satker yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 (*Unaudited*) sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Singkawang, 13 Mei 2022
Kepala KPKNL Singkawang



Odyses Medwan Simurat
NIP 19700314 199703 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan (*Audited*) KPKNL Singkawang TA 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.533.610.063,00 atau mencapai 181,21% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.950.042.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.955.446.232,00 atau mencapai 95,40% dari alokasi anggaran sebesar Rp2.049.629.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp18.454.979.267,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp34.373.878,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp18.420.605.389,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0; Akumulasi Penyusutan sebesar Rp4.356.543.228,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.157.000,00 dan Rp18.453.822.267,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,

surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.527.129.026,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp1.568.006.660,00, sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp1.959.122.366,00. Jumlah Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp6.470.000,00, sehingga entitas mengalami surplus-LO sebesar Rp1.965.592.366,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp18.071.624.928,00 ditambah Surplus-LO sebesar Rp1.965.592.366,00, koreksi nilai aset non revaluasi sebesar (Rp5.231.196,00), transaksi antar entitas senilai (Rp1.578.163.831,00), sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp18.453.822.267,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGKAWANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021		% thd Angg	2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.950.042.000	3.533.610.063	181,21	1.523.436.033
JUMLAH PENDAPATAN		1.950.042.000	3.533.610.063	181,21	1.523.436.033
BELANJA					
Belanja Operasional	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	723.148.840
Belanja Barang	B.4	1.328.769.000	1.234.586.704	92,91	1.363.162.257
Jumlah Belanja Operasional		1.328.769.000	1.234.586.704	92,91	2.086.311.097
Belanja Modal					
Belanja Peralatan dan Mesin	B.5	60.481.000	60.480.750	100,00	180.041.150
Belanja Gedung dan Bangunan	B.6	660.379.000	660.378.778	100,00	51.278.000
Jumlah Belanja Modal		720.860.000	720.859.528	100,00	231.319.150
JUMLAH BELANJA		2.049.629.000	1.955.446.232	95,40	2.317.630.247

II. NERACA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGKAWANG
NERACA
PER 30 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	11.037
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	1.157.000	1.603.663
Persediaan	C.4	33.216.878	23.656.308
Jumlah Aset Lancar		34.373.878	25.271.008
ASET TETAP			
Tanah	C.5	11.793.000.000	11.793.000.000
Peralatan dan Mesin	C.6	4.324.009.123	4.263.528.373
Gedung dan Bangunan	C.7	6.660.139.494	5.948.482.716
Aset Tetap Lainnya	C.8	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.9	-	51.278.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.10	(4.356.543.228)	(4.008.331.506)
Jumlah Aset Tetap		18.420.605.389	18.047.957.583
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.11	-	12.435.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.12	-	(12.435.000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		18.454.979.267	18.073.228.591
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.13	1.157.000	1.603.663
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.157.000	1.603.663
JUMLAH KEWAJIBAN		1.157.000	1.603.663
EKUITAS			
Ekuitas	C.14	18.453.822.267	18.071.624.928
JUMLAH EKUITAS		18.453.822.267	18.071.624.928
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		18.454.979.267	18.073.228.591

III. LAPORAN OPERASIONAL**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGKAWANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2021***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2021
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	3.527.129.026
JUMLAH PENDAPATAN		3.527.129.026
BEBAN		
Beban Pegawai	D.2	-
Beban Persediaan	D.3	70.785.280
Beban Barang dan Jasa	D.4	791.920.052
Beban Pemeliharaan	D.5	265.916.105
Beban Perjalanan Dinas	D.6	96.404.697
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	342.980.526
JUMLAH BEBAN		1.568.006.660
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		1.959.122.366
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		6.470.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	6.470.000
KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-
SURPLUS (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		1.965.592.366
POS LUAR BIASA		
Beban Luar Biasa	D.9	-
SURPLUS/DEFISIT LO		1.965.592.366

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGKAWANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021
EKUITAS AWAL	E.1	18.071.624.928
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	1.965.592.366
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(5.231.196)
PENYESUAIAN NILAI ASET		-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		-
SELISIH REVALUASI ASET		-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI		(5.231.196)
LAIN-LAIN		
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(1.578.163.831)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		382.197.339
EKUITAS AKHIR	E.5	18.453.822.267

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis KPKNL Singkawang

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

KPKNL Singkawang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

KPKNL Singkawang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Melalui peran KPKNL Singkawang diharapkan kualitas laporan keuangan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, KPKNL Singkawang berkomitmen dengan visi:

“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel, dan transparan melalui implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPKNL Singkawang melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan usaha-usaha yang berkelanjutan berkaitan dengan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.
2. Memaksimalkan pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi berbasis akrual yang diimplementasikan.
3. Mengembangkan sistem informasi yang andal dan terpercaya.
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan 31 Desember 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPKNL Singkawang. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan 31 Desember 2021 KPKNL Singkawang ini merupakan laporan tunggal, yaitu KPKNL Singkawang sebagai satker.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

KPKNL Singkawang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPKNL Singkawang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Singkawang adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian

Negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama Kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015, Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun- akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Realisasi
Pendapatan
Rp3.533.610.063,0
0*

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.533.610.063,00 sedangkan estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.950.042.000,00. Pendapatan di lingkup KPKNL Singkawang berasal dari 7 sumber, yaitu Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, Pendapatan Jasa berupa Bea Lelang, Pendapatan Bea Lelang Pegadaian, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, Bangunan, Pendapatan Jasa Lainnya dan Pendapatan Anggaran Lainnya.

Perbandingan Realisasi Pendapatan s.d. 31 Desember 2021 dengan TA 2020

URAIAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	6.429.143	1.151.078	458,53
Pendapatan Bea Lelang	2.855.875.672	1.189.794.529	140,03
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	664.334.526	327.803.786	102,66
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	6.470.000	1.818.000	255,89
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		2.368.640	-100,00
Pendapatan Jasa Lainnya	722	500.000	-99,86
Pendapatan Anggaran Lainnya	500.000		100,00
Jumlah	3.533.610.063	1.523.436.033	131,95

*Realisasi Belanja
Negara
Rp1.955.446.232,00*

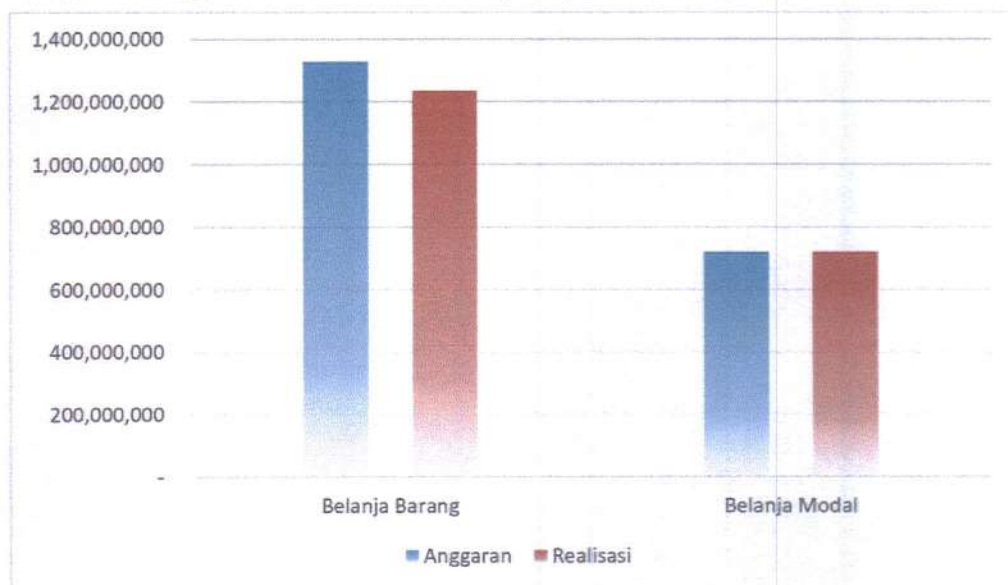
B.2. BELANJA

Realisasi Belanja KPKNL Singkawang pada TA 2021 adalah sebesar Rp1.955.446.232,00 atau 95,40% dari anggaran belanja sebesar Rp2.049.629.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	1.328.769.000	1.234.586.704	92,91
Belanja Modal	720.860.000	720.859.528	100,00
Total Belanja Kotor	2.049.629.000	1.955.446.232	95,40
Pengembalian Belanja	-	-	
Total Belanja	2.049.629.000	1.955.446.232	95,40

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar 15,63% dibandingkan periode pada TA 2020 hal tersebut dikarenakan mulai tahun 2020 bulan Agustus dilakukan *cut off* pembayaran belanja pegawai oleh Satker, sehingga Satker sudah tidak membayarkan belanja pegawai sebagaimana mestinya tahun-tahun yang lalu dan belanja pegawai dibayarkan secara terpusat pada Kantor Pusat DJKN. Namun jika dilihat tanpa komponen belanja pegawai, realisasi belanja barang dan belanja modal KPKNL Singkawang mengalami kenaikan dikarenakan tahun 2021 merupakan awal mula pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia sehingga memengaruhi kegiatan belanja, terutama belanja modal renovasi atap yang awalnya akan diselesaikan pada TA 2020 terpaksa harus diundur ke TA 2021 dikarenakan dana yang ada harus dikembalikan/*refocusing* untuk penanganan pandemi Covid-19.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan 2020

URAIAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	0	723.148.840	(100,00)
Belanja Barang	1.234.586.704	1.363.162.257	(9,43)
Belanja Modal	720.859.528	231.319.150	211,63
Jumlah	1.955.446.232	2.317.630.247	(15,63)

Belanja Pegawai
Rp0

B.3 Belanja Pegawai

Pada Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat belanja pegawai dikarenakan pembayaran sudah dilakukan secara terpusat pada Kantor Pusat DJKN sejak Bulan Agustus 2020, sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 tidak 100% dikarenakan adanya pengembalian pagu anggaran belanja pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2020 sebesar Rp723.148.840,00. Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, tidak ada realisasi belanja TA 2021, seperti yang sudah dijelaskan diatas pada TA 2021 tidak ada pagu anggaran untuk belanja pegawai sehingga jelas akan mengalami penurunan sebesar 100% dari realisasi belanja TA 2020.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2021 dan 2020

URAIAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	722.296.840	(100,00)
Belanja Lembur	-	852.000	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	0	723.148.840	(100,00)
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	
Jumlah Belanja	0	723.148.840	(100,00)

Belanja Barang
Rp1.234.586.704,0
0

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.234.586.704,00 dan Rp1.363.162.257,00 atau mengalami penurunan sebesar 9,43%.

Perbandingan Belanja Barang pada TA 2021 dan 2020

URAIAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	572.637.937	618.711.557	(7,45)
Belanja Barang Non Operasional	11.358.000	8.088.000	40,43
Belanja Barang Persediaan	80.345.850	131.978.700	(39,12)
Belanja Jasa	207.924.115	165.324.329	25,77
Belanja Pemeliharaan	265.916.105	336.006.305	(20,86)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	96.404.697	103.053.366	(6,45)
Jumlah Belanja Kotor	1.234.586.704	1.363.162.257	(9,43)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1.234.586.704	1.363.162.257	(9,43)

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp60.480.750,00

B.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp60.480.750,00 dan Rp180.041.150,00 atau mengalami penurunan sebesar 66,41% hal ini antara lain dikarenakan dikarenakan belanja modal peralatan dan mesin memang sudah tidak banyak, yang kami butuhkan hanya kursi besi dan UPS dan sudah realisasi di triwulan I sehingga sudah tidak ada realisasi lagi untuk belanja modal peralatan dan mesin.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	2021	2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.480.750	180.041.150	-66,41
Jumlah Belanja Kotor	60.480.750	180.041.150	-66,41
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	60.480.750	180.041.150	-66,41

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp660.378.778,00

B.6 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp660.378.778,00 dan Rp51.278.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 1187,84% dikarenakan belanja modal renovasi atap yang awalnya akan diselesaikan pada TA 2020 terpaksa harus diundur ke TA 2021 dikarenakan dana yang ada harus dikembalikan/refocusing untuk

penanganan pandemi Covid-19 sehingga realisasi yang seharusnya ada di TA 2020 menjadi realisasi TA 2021 dikarenakan pengerjaan konstruksi dilaksanakan di TA 2021.

URAIAN JENIS BELANJA	2021	2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	660.378.778	51.278.000	1187,84
Jumlah Belanja Kotor	660.378.778	51.278.000	1187,84
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	660.378.778	51.278.000	1187,84

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2021 dan 2020

Keterangan	2021	2020
Saldo UP	-	0
Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	-	0
Jumlah	-	-

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,00*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar masing-masing Rp0,00 dan Rp11.037. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2021 dan 2020

Jenis	2021	2020
Biaya Administrasi PPN	-	11.037
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	-	0
Dana Yang Masih Dalam Proses Identifikasi dan Konfirmasi	-	
Jumlah	-	11.037

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp1.157.000,00*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.157.000,00 dan Rp1.603.633,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran

yang bukan berasal dari UP/ TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2021 dan 2020

Persediaan	2021	2020
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	1.157.000	1.603.633
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang belum disahkan	-	-
Jumlah	1.157.000	1.603.633

Persediaan
Rp33.216.878,00

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp33.216.878,00 dan Rp23.656.308,00

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2021 dan 2020

Persediaan	2021	2020
Barang Konsumsi	33.216.878	23.656.308
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Pita Cukai, Materai, dan Leges	-	-
Jumlah	33.216.878	23.656.308

Tanah
Rp11.793.000.000,
00

C.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup KPKNL Singkawang per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sama yaitu sebesar Rp11.793.000.000,00. Nilai tanah tetap karena tidak terdapat penambahan, penilaian kembali maupun penyusutan terhadap tanah tersebut pada TA 2021. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap berupa Tanah

No.	Satker	KIB	Luas	Nilai
1	KPKNL Singkawang	2010101001	336 m2	Rp 141.120.000
2	KPKNL Singkawang	2010104001	2.505 m2	Rp 11.651.880.000
Jumlah				Rp 11.793.000.000

C.6 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp4.324.009.123,0
0

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.324.009.123,00 dan Rp4.263.528.373,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Peralatan dan Mesin TA 2021

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	Rp	4.263.528.373
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	60.480.750
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk	Rp	170.743.000
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Reklasifikasi Keluar	Rp	(170.743.000)
Koreksi Pencatatan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	4.324.009.123
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	Rp	(3.807.487.900)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	Rp	516.521.223

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Pembelian 15 unit Kursi Besi senilai Rp28.767.750,00 dan 2 unit UPS senilai Rp31.713.000,00; dan
- Reklasifikasi masuk Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen senilai Rp170.743.000,00 .

Mutasi transaksi pengurangan peralatan dan mesin berupa:

- a. Reklasifikasi keluar Rumah Negara Golongan II Tipe C permanen senilai Rp170.743.000,00 .

C.7 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp6.660.139.494,0
0*

Nilai perolehan aset tetap berupa gedung dan bangunan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.660.139.494,00 dan Rp5.948.482.716,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Gedung dan Bangunan TA 2021

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	Rp	5.948.482.716
Mutasi tambah:	Rp	711.656.778
Mutasi kurang:	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	6.660.139.494
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	Rp	(549.055.328)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	Rp	6.111.084.166

*Aset Tetap Lainnya
Rp0,00*

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yaitu sama sebesar Rp0,00.

Rincian Aset Tetap Lainnya

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	Rp	-
Mutasi tambah:	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	Rp	-

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.9 Konstruksi Dalam Pengerjaan

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp0,00*

Saldo KDP per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp51.278.000,00. KDP TA 2021 pada KPKNL Singkawang telah didefinisikan menjadi aset tetap per 31 Desember 2021.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(4.356.543.228,0
0)

C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp4.356.543.228,00 dan Rp4.008.331.506,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 4.324.009.123	Rp (3.807.487.900)	Rp 516.521.223
2	Gedung dan Bangunan	Rp 6.660.139.494	Rp (549.055.328)	Rp 6.111.084.166
	Jumlah	Rp 10.984.148.617	Rp (4.356.543.228)	Rp 6.627.605.389

Aset Lain-Lain
Rp0

C.11 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yaitu masing-masing senilai Rp0 dan Rp12.435.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup KPKNL Singkawang serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Lain-lain

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	Rp	-
Mutasi tambah:		
- reklasifikasi dari aset tetap	Rp	-
Mutasi kurang:		
- penghapusan BMN	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	Rp	-

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp0*

C.12 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yaitu masing-masing senilai Rp0 dan Rp12.435.000,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp1.157.000,00*

C.13 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.157.000,00 dan Rp1.603.663,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

*Ekuitas
Rp18.453.822.276,0
0*

C.14 Ekuitas

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp18.453.822.276,00 dan Rp18.071.624.928,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBPNP
Rp3.527.129.026,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.527.129.026,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Uraian	2021	2020	% Real Angg.
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	3.527.129.026	1.521.629.070	131,80
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	3.527.129.026	1.521.629.070	131,80

Beban Pegawai
Rp0,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp723.148.840,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji		723.148.840	-100%
Beban Lembur			0%
Jumlah	0	723.148.840	-100%

Beban Persediaan
Rp70.785.280,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp70.785.280,00 dan Rp136.762.204,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

*Beban Barang dan
Jasa
Rp791.920.052,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp791.920.052,00 dan Rp778.599.648,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Beban Barang dan Jasa	791.920.052	778.599.648	1,71
Jumlah	791.920.052	778.599.648	1,71

*Beban Pemeliharaan
Rp265.916.105,00*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp265.916.105,00 dan Rp336.006.305,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	133.060.000	155.768.810	-14,58
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	132.856.105	176.387.495	-24,68
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi Covid-19	0	3.850.000	-100,00
Jumlah	265.916.105	336.006.305	-20,86

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp96.404.697,00*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada untuk periode yang berakhir pada 31 Desember dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp96.404.697,00 dan Rp103.053.366,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	76.328.697	83.496.866	-8,58
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.076.000	19.556.500	2,66
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0,00
Jumlah	96.404.697	103.053.366	-6,45

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp342.980.526,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp342.980.526,00 dan Rp326.931.268,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2021 dan 2020

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	213.317.981	199.234.122	7
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	129.662.545	127.697.146	2
Beban Penyusutan Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	-	-	-
Jumlah Penyusutan	342.980.526	326.931.268	5
Beban Amortisasi Aplikasi	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	342.980.526	326.931.268	5

*Defisit dari Kegiatan
Non Operasional
Rp6.470.000,00*

D.8 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan 2020

URAIAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Surplus/(defisit) Kegiatan Non Operasional			
Pelepasan Aset Non Lancar	6.470.000	1.818.000	100
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	21.121.160	0
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	253.695.194	-100
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	249.623.820	-100
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	6.470.000	(15.231.786)	(142,48)

*Pos Luar Biasa
Rp0*

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Saldo Pos Luar Biasa untuk TA 2021 dan 2020 adalah Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

*Rp18.071.624.928,
00*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2021 dan 01 Januari 2020 adalah masing-masing sebesar Rp18.071.624.928,00 dan Rp18.073.747.701,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban.

Surplus(defisit) LO

Rp1.965.592.366,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.965.592.366,00 dan (Rp898.104.347,00). Surplus (defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Penyesuaian Nilai

Tahun Berjalan

Rp(5.231.196,00)

E.3 Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan

Penyesuaian Nilai Aset Tetap merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi Penilaian aset tetap untuk TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp(5.231.196,00) dan Rp8.100.000,00.

Ekuitas Akhir

Rp18.453.882.267,00

E.4 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp18.453.882.267,00 dan Rp18.071.624.928,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

1. Rincian realisasi belanja dalam rangka penanganan pandemi covid-19 dengan penggunaan akun Penanganan Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

No.	Akun	Detil	Anggaran	Realisasi	%
1.	521131	Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid-19	25.093.000	21.834.010	87%
2.	522191	Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19	68.000.000	47.374.000	69,6%
Total			93.093.000	69.208.010	74%

2. Pada tahun 2021 di lingkup KPKNL Singkawang terdapat perubahan Pejabat Pengelola Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan	Semula	Menjadi
Kuasa Pengguna Anggaran	Odyses Medwan Sinurat	Odyses Medwan Sinurat
Pejabat Pembuat Komitmen	Johan Wahyudi	Domas Meida Budiyanto
Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Dimas Imam Apriliawan	Eko Budi Hariyanto
Bendahara Pengeluaran	Vicencia Mita Haninditya	Velient Vinandha